

## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SIKAP WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Gumulya Sonny Marcel Kusuma<sup>1\*</sup>, Anggrelia Afrida<sup>2</sup>, Mella Handayani

<sup>1)</sup> *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang*  
Email : <sup>1</sup> [gsmarcelk@gmail.com](mailto:gsmarcelk@gmail.com), <sup>2</sup> [angelakbar18@gmail.com](mailto:angelakbar18@gmail.com)

---

### INFORMASI ARTIKEL

Submitted:  
12/03/2023

Received:  
06/05/2023

Revised:  
01/11/2023

Accepted:  
02/11/2023

Online-Published:  
03/11/2023

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. Sampel penelitian ini berjumlah 100 responden wajib pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini menggunakan analisis *Partial Least Square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil lain menunjukkan sikap wajib pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah, Kepatuhan Wajib Pajak

### ABSTRACT

*This study analyzes the effect of taxpayer awareness, taxpayer attitudes, tax responses and the level of trust in the government on taxpayer compliance (PBB-P2). This study used simple random sampling. The sample of this research is 100 land and building taxpayer respondents. This study uses Partial Least Square analysis. The results of the study show that taxpayer awareness and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Other results show that the attitude of the taxpayer and the level of trust in the government have no significant effect on taxpayer compliance.*

Keywords : *taxpayer awareness, tax sanctions, taxpayer attitude, level of trust in the government, Taxpayer Compliance*

---

### A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi pada Negara yang bersifat memaksa yang telah diatur undang-undang (Siregar, 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan hal penting untuk megoptimalkan penerimaan negara dari pajak (Primasari, 2016). Penerimaan negara di Indonesia sebagian besar berasal dari penerimaan

pajak yang akan digunakan untuk biaya pembangunan nasional serta pengeluaran-pengeluaran Negara lainnya (Hartana dan Merkusiwati, 2018). Pemerintah terus mengeluarkan dan merevisi peraturan perpajakan sesuai dengan kondisi wajib pajaknya untuk peningkatan kepatuhan perpajakan wajib pajak, namun tidak dapat dipungkiri masih ada celah-celah

yang menimbulkan permasalahan-permasalahan lain (Primasari, 2016).

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah. Kesadaran wajib pajak merupakan partisipasi wajib pajak dalam menunjang pembangunan negara dengan adanya dorongan untuk mematuhi peraturan perpajakan bahkan kesadaran bahwa pelanggaran peraturan perpajakan akan merugikan negara (Atarwaman, 2020). Sanksi pajak berperan untuk memberikan rasa jera kepada wajib pajak yang meremehkan peraturan perpajakan Nafiah et al (2021)

Beberapa penelitian terdahulu terkait kepatuhan wajib pajak menghasilkan hasil yang beragam, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Nafiah et al, 2021; Arum, 2012; Khuzaimah dan Hermawan, 2018; Siregar, 2017), sedangkan penelitian lain menghasilkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan (Atarwaman, 2020; Primasari, 2016). Pada penelitian Kristanti dan Subardjo (2021) menghasilkan sikap wajib pajak berpengaruh positif. (Purnamasari, Pratiwi, & Sukirman, 2017). Hasil penelitian sebelumnya menghasilkan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan (Atarwaman, 2020; Nafiah et al, 2021; Khuzaimah dan Hermawan, 2018) sedangkan penelitian lain menghasilkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Asfa dan Meiranto, 2017). Pada penelitian Ramdhani (2020) menghasilkan tingkat

kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Primasari (2016) dan Purnamasari et al (2017), menghasilkan tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak mematuhi kewajiban pajak dan menggunakan haknya dengan tetap mengacu pada peraturan pajak (Hartana dan Merkusiwati, 2018; Wulandari dan Suyanto 2014). Menurut Kristanti dan Subardjo (2021), kepatuhan wajib pajak sebagai motivasi atau sebagai minat para wajib pajak dalam membayar pajak

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Atarwaman (2020), kesadaran wajib pajak adalah kondisi wajib pajak yang telah mengetahui dan mengerti untuk mematuhi dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Kesadaran wajib pajak merupakan itikad wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya mematuhi peraturan perpajakan sesuai hati nuraninya (Nafiah et al ,2021). Kesadaran wajib pajak merupakan pengetahuan wajib pajak yang akan membuat wajib pajak berperilaku sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak tersebut akan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan Khuzaimah dan Hermawan (2018)

*H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

### **Sanksi Pajak**

Menurut Khuzaimah dan Hermawan (2018), sanksi pajak merupakan rambu-rambu bagi wajib pajak untuk melakukan apa yang harus dilakukan sesuai aturan berlaku dan merupakan hukuman bagi para pelanggar. Sanksi pajak dapat mengurangi pelanggaran peraturan perpajakan dikarenakan wajib pajak akan mengalami kerugian jika melakukan pelanggaran (Atarwaman, 2020). Wajib pajak akan lebih memperdulikan kepatuhannya jika sanksi pajak semakin tinggi (Asfa dan Meiranto, 2017)

*H2: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

### **Sikap Wajib Pajak**

Menurut Ramdhani (2020), sikap wajib pajak merupakan pernyataan wajib pajak baik menguntungkan wajib pajak atau merugikan wajib pajak terkait subjek pajak, objek pajak, ataupun suatu peristiwa perpajakan. Sikap wajib pajak terbentuk karena hasil evaluasi seseorang dalam mendukung kewajiban perpajakannya untuk mematuhi aturan perpajakan, sedangkan seseorang yang memiliki sikap tidak mendukung tindakan perpajakan akan lebih cenderung tidak mematuhi peraturan perpajakan Kristanti dan Subardjo (2021).

*H3: Sikap Wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

### **Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah**

*Kepercayaan pada pemerintah merupakan pengukuran apa yang*

*diharapkan wajib pajak dalam system pemerintah dan system hokum yang berlaku berdasarkan norma dan nilai di masyarakat dan lingkungan wajib pajak (Purnamasari et al, 2017). Semakin wajib pajak mempercayai peran pemerintah dalam mengelola peraturan perpajakan dan pengelola penerimaan pajak akan membuat wajib pajak dengan sukarela membayar pajak dikarenakan penggunaan penerimaan pajak akan kembali ke wajib pajak itu sendiri dalam bentuk pembangunan.*

(Ramdhani, 2020)

*H4: Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

## **B. METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di kecamatan Kalidoni, Palembang yang terdiri dari 5 kelurahan, yaitu Kalidoni, Sungai Selincah, Bukit Sangkal, Sungai Selayur, dan Sungai Lais. Penentuan sampel menggunakan simple random sampling dan penggunaan rumus *Slovin*. Kuesioner yang diolah diisi dengan lengkap berjumlah 100 kuesioner.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian menggunakan *explanatory causal-comparative research* yang menguji dan menjelaskan hubungan antara variabel endogen dan eksogen. Penelitian ini menggunakan kuesioner data primer yang disebar ke pada wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di kecamatan Kalidoni, Palembang.

### **Definisi Operasional Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KT)**

Kepatuhan Wajib Pajak meliputi 4 indikator, yaitu mendaftarkan diri, perhitungan, pembayaran pajak terutang, dan penyampaian surat pemberitahuan. Variabel ini diukur dengan 4 pertanyaan merujuk pada Salmah (2018) menggunakan *semantic scale*.

### **Kesadaran Wajib Pajak (KE)**

Kesadaran Wajib Pajak meliputi 6 indikator, yaitu kewajiban, hasil pemungutan pajak, peningkatan sumber pembiayaan pembangunan, faktor pemasukan Negara, kinerja aparat pajak, pemahaman sosialisasi. Variabel ini diukur dengan 6 pertanyaan merujuk pada Salmah (2018) menggunakan *semantic scale*.

### **Sikap Wajib Pajak (SI)**

Sikap wajib pajak meliputi 4 indikator, yaitu, sikap terhadap pelayanan pajak, sanksi pajak, perraturan yang berlaku, dan administrasi pajak. Variabel ini diukur dengan 4 pertanyaan merujuk pada Kristanti dan Subardjo (2021) menggunakan *semantic scale*.

### **Sanksi Pajak (SN)**

Sanksi pajak meliputi 4 indikator, yaitu denda keterlambatan, sanksi denda dan pidana, pertimbangan denda, pembayaran denda. Variabel ini diukur dengan 4 pertanyaan merujuk pada Kristanti dan Subardjo (2021) menggunakan *semantic scale*.

### **Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah (TK)**

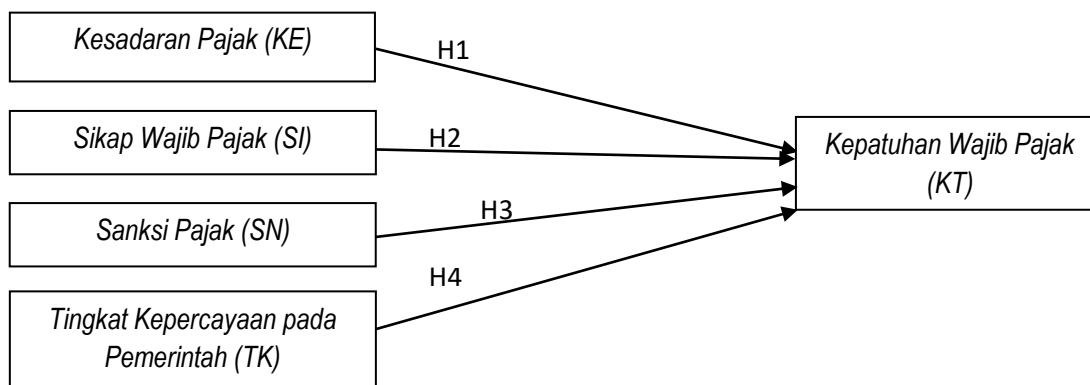
Tingkat kepercayaan pada pemerintah meliputi 6 indikator, yaitu kepercayaan

pembiayaan pengeluaran daerah, kepercayaan system hukum, kepercayaan lembaga peradilan, kepercayaan pengalokasian pajak, kepercayaan pajak untuk kesejahteraan rakyat, kepercayaan aparat pajak. Variabel ini diukur dengan 6 pertanyaan merujuk pada Kristanti dan Subardjo (2021) menggunakan *semantic scale*.

### **Metode Analisis Data**

Analisis data dimulai dengan memberikan gambaran demografi responden dengan menggunakan statistik deskriptif yaitu jenis kelamin, umur, dan pendidikan terakhir. Selanjutnya, kuesioner diolah melalui SEM (*Structural Equation Model*) pendekatan PLS (*Partial Least Square*). Tahap pengujian hipotesis dengan menilai *Outer Model* menggunakan *outer loading* dan *Composite reliability*. Selanjutnya dilakukan penilaian *Inner Model-Structural Model* untuk pengujian hipotesis

**Model Penelitian**



**Gambar 1**  
**Model Penelitian**

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Karakteristik Responden**

**Tabel 1. Karakteristik Responden**

Berikut adalah gambaran umum profil responden:

Karakteristik		Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	56	56%
	Wanita	44	44%
	<b>Jumlah</b>	100	100%
Umur	<25 tahun	24	24%
	25-32 tahun	34	34%
	>33 tahun	42	42%
	<b>Jumlah</b>	100	100%
Pendidikan	SMA	57	57%
	D III	15	15%
	S1	28	28%
	<b>Jumlah</b>	100	100%

Sumber Data: Data Olahan (2023)

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

Berikut adalah statistik deskriptif variabel:

Variabel	Teoritis		Sesungguhnya		Standar deviasi
	Kisaran	Median	Mean	Mean per pertanyaan	
KT	4 s/d 20	12	14,07	3,51	2,57
KE	6 s/d 30	18	21,78	3,63	3,61
SI	4 s/d 20	12	12,92	3,23	3,05
SN	4 s/d 20	12	13,24	3,31	2,03
TK	6 s/d 30	18	20,09	3,24	3,20

Sumber Data: (2023)

Berdasarkan tabel 2 statistic deskriptif, nilai rata-rata responden diatas nilai median pada setiap variabel. Hal ini berarti, responden pada umumnya telah

memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan, memiliki sikap mentaati aturan, memahami sanksi yang berlaku, mempercayai pemerintah dan mematuhi aturan perpajakan

### Penilaian *Outer Model* dengan *Convergent Validity*

Setiap item pertanyaan akan diuji. Konstruk item pertanyaan dengan nilai *outer loading* > 0,5 menunjukkan indikator konstruk adalah valid (Ghozali dan Latan, 2014).

#### *Outer Model-Measurement Model* untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (KT)

Variabel kepatuhan wajib pajak PBB-P2 memiliki 4 item pertanyaan yang terdiri dari KT<sub>1</sub> sampai dengan KT<sub>4</sub>. Berdasarkan hasil pengukuran *outer loading* pada variabel kepatuhan wajib pajak PBB-P2, seluruh nilai item memiliki nilai *outer loading* diatas 0,5. Hasil ini menunjukkan seluruh item pertanyaan variabel kepatuhan wajib pajak PBB-P2 telah memenuhi syarat validitas

**Tabel 4. Outer Loading Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (KT)**

Indikator	Loading
KT <sub>1</sub>	0,846
KT <sub>2</sub>	0,784
KT <sub>3</sub>	0,744
KT <sub>4</sub>	0,740

Sumber Data: Data Olahan (2023)

#### *Outer Model-Measurement Model* untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (KE)

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki 6 item pertanyaan yang terdiri dari KE<sub>1</sub> sampai dengan KE<sub>6</sub>. Berdasarkan hasil pengukuran *outer loading* pada variabel kesadaran wajib pajak, seluruh nilai item memiliki nilai *outer loading* diatas 0,5. Hasil ini menunjukkan seluruh item pertanyaan variabel kesadaran wajib pajak telah memenuhi validitas syarat validitas

**Tabel 4. Outer Loading Kesadaran Wajib Pajak (KE)**

Indikator	Loading
KE <sub>1</sub>	0,827
KE <sub>2</sub>	0,716
KE <sub>3</sub>	0,673
KE <sub>4</sub>	0,714
KE <sub>5</sub>	0,585
KE <sub>6</sub>	0,579

Sumber Data: Data Olahan (2023)

#### *Outer Model-Measurement Model* untuk variabel Sikap Wajib Pajak (SI)

Variabel sikap wajib pajak memiliki 4 item pertanyaan yang terdiri dari SI<sub>1</sub> sampai dengan SI<sub>4</sub>. Berdasarkan hasil pengukuran *outer loading* pada variabel sikap wajib pajak, seluruh nilai item memiliki nilai *outer loading* diatas 0,5. Hasil ini menunjukkan seluruh item pertanyaan variabel sikap wajib pajak telah memenuhi syarat validitas

**Tabel 5. Outer Loading Sikap Wajib Pajak (SI)**

Indikator	Loading
SI <sub>1</sub>	0,690
SI <sub>2</sub>	0,703
SI <sub>3</sub>	0,724
SI <sub>4</sub>	0,669

Sumber Data: Data Olahan (2023)

#### *Outer Model-Measurement Model* untuk variabel Sanksi Pajak (SN)

Variabel sanksi pajak memiliki 4 item pertanyaan yang terdiri dari SN<sub>1</sub> sampai dengan SN<sub>4</sub>. Berdasarkan hasil pengukuran *outer loading* pada variabel sanksi pajak, seluruh nilai item memiliki nilai *outer loading* diatas 0,5. Hasil ini menunjukkan seluruh item pertanyaan variabel sanksi pajak telah memenuhi syarat validitas

**Tabel 6. Outer Loading Sanksi Pajak**

Indikator	Loading
SN <sub>1</sub>	0,774
SN <sub>2</sub>	0,771
SN <sub>3</sub>	0,788
SN <sub>4</sub>	0,749

Sumber Data: Data Olahan (2023)

*Outer Model-Measurement Model untuk variabel Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah (TK)*

Variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah memiliki 6 item pertanyaan yang terdiri dari TK<sub>1</sub> sampai dengan TK<sub>6</sub>. Berdasarkan hasil pengukuran *outer loading* pada variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah, terdapat item pertanyaan yang tidak memenuhi syarat sehingga perlu dire-estimasi dengan tanpa menyertakan item pertanyaan yang tidak memenuhi syarat. Setelah dilakukan re-estimasi, seluruh nilai item memiliki nilai *outer loading* diatas 0,5. Hasil ini menunjukkan seluruh item pertanyaan variabel tingkat kepercayaan telah memenuhi syarat validitas

**Tabel 7. Outer Loading Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah**

Indikator	Loading	Re-estimasi
TK <sub>1</sub>	0,478	-
TK <sub>2</sub>	0,377	-
TK <sub>3</sub>	0,669	0,756
TK <sub>4</sub>	0,544	0,879
TK <sub>5</sub>	0,250	-
TK <sub>6</sub>	0,330	-

Sumber Data: Data Olahan (2023)

*Penilaian Outer Model dengan Composite Reliability*

Setelah dilakukan re-estimasi pada variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah Seluruh variabel memiliki nilai *composite reliability* diatas 0,7 maka dapat disimpulkan semua indikator konstruk memenuhi uji reliabilitas

**Tabel 8  
Composite Reliability**

	Sebelum re-estimasi	Setelah re-estimasi
KT	0,861	0,861
KE	0,841	0,841
SI	0,790	0,790
SN	0,854	0,854
TK	0,456	0,803

Sumber Data: Data Olahan (2023)

**Pengujian Model Struktural (Inner Model) – R square**

Berdasarkan pengujian inner model, nilai *R square* sebesar 0,58. Hal ini berarti bahwa 58% variable kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah. Sebesar 42% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

**Tabel 8  
R Square**

	R-Square	R Square Adjust
KT	0,580	0,562

Sumber Data: Data Olahan (2023)

**Pengujian Model Struktural (Inner Model) - Signifikansi Path**

Pengujian hipotesis dengan melihat arah pengaruh hipotesis dan dengan melihat membandingkan nilai t-statistik dengan t-tabel ( $\alpha=0,05$ ) sebesar 1,96 (Ghozali dan Latan, 2014).

**Tabel 9  
Uji Signifikansi Path**

	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Error</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P value</i>	<i>Hipotesis</i>
KE -> KT	0,393	0,404	0,065	6,079	0,000	H <sub>1</sub> diterima
SI -> KT	0,158	0,154	0,089	1,770	0,077	H <sub>2</sub> ditolak
SN -> KT	0,380	0,377	0,101	3,767	0,000	H <sub>3</sub> diterima
TK -> KT	-0,092	-0,092	0,086	1,063	0,288	H <sub>4</sub> ditolak

Sumber Data: Data Olahan (2023)

## PEMBAHASAN PENELITIAN

### Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Hasil uji terhadap variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 menunjukkan ada pengaruh positif sebesar 39,3% (*original sample* KE→KT dengan nilai 0,395) dan signifikan pada ( $\alpha=0,05$ ) dengan nilai statistik 6,079 (lebih dari 1,96) dengan *p value* 0,000 (kurang dari 0,05) . Berdasarkan uji t, hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama (H<sub>1</sub>). Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya akan memiliki itikad baik untuk mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, diantaranya adalah penelitian Nafiah et al (2021), Arum (2012), Khuzaimah dan Hermawan (2018), Siregar (2017)

### Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Hasil uji terhadap variabel sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 menunjukkan ada pengaruh positif sebesar 15,8% (*original sample* SI→KT dengan nilai 0,158) tetapi tidak signifikan pada ( $\alpha=0,05$ ) dengan nilai statistik 1,770 (kurang dari 1,96) dengan *p value* 0,077 (lebih dari 0,05).

Berdasarkan uji t, hasil penelitian ini menolak hipotesis kedua (H<sub>2</sub>). Hal ini dikarenakan wajib pajak akan lebih mencari keuntungan dengan bersikap menghindari sanksi pajak karena akan merugikan wajib pajak (Wulandari & Suyanto, 2014). Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Ramdhani, 2020).

### Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Hasil uji terhadap variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 menunjukkan ada pengaruh positif sebesar 38,0% (*original sample* SN→KT dengan nilai 0,380) dan signifikan pada ( $\alpha=0,05$ ) dengan nilai statistik 3,767 (lebih dari 1,96) dengan *p value* 0,000 (kurang dari 0,05). Berdasarkan uji t, hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>). Kesimpulan hasil penelitian ini adalah semakin tinggi pengetahuan wajib pajak akan sanksi yang dapat dikenakan pada dirinya jika tidak mematuhi peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, diantaranya adalah penelitian Hartana dan Merkusiwati (2018), Khuzaimah dan Hermawan (2018), Soda et al (2021), Atarwaman (2020), Nafiah et al (2021), , Siregar (2017)



## Pengaruh Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Hasil uji terhadap variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 menunjukkan ada pengaruh negatif sebesar 9,2% (*original sample* TK→KT dengan nilai -0,092) tetapi tidak signifikan pada ( $\alpha=0,05$ ) dengan nilai statistik 1,063 (kurang dari 1,96) dengan *p value* 0,288 (lebih dari 0,05). Berdasarkan uji t, hasil penelitian ini

### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2
2. Sikap wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2
4. Tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2

Keterbatasan ruang lingkup wilayah responden dapat mempengaruhi hasil penelitian sehingga hasil penelitian lain dapat berbeda di wilayah yang berbeda. Penelitian selanjutnya dapat memperluas lingkup wilayah responden. Penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain, diantaranya pengetahuan Pemahaman Internet (Suryati dan Setiawan, 2020), perpajakan (Wardani dan Wati, 2018), Persepsi Keadilan (Soda et al, 2021)

menolak hipotesis keempat ( $H_4$ ). Menurut Primasari (2016), hal ini dikarenakan kurangnya kepercayaan wajib pajak karena adanya kasus pelanggaran pajak yang melibatkan petugas pajak/ fiskus. Hal tersebut membuat wajib pajak belum mempercayai secara penuh pada aparat pemerintah dan sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Primasari (2016), Purnamasari et al (2017)

### E. DAFTAR RUJUKAN

- Arum, H. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1(1), 1-8.
- Asfa, E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(3), 1-13.
- Atarwaman, R. (2020, Juli). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39-51.
- Hartana, I. G., & Merkusiwati, N. A. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25, 1506-1533.
- Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Islamic Accounting and Tax*, 1(1), 37-48.

- Kristanti, Y. A., & Subardjo, A. (2021). Pengaruh Sikap, Pemahaman, Sanksi Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(6).
- Nafiah, Z., Sopi, & Novandalina, A. (2021, Juni). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Pati. *JURNAL STIE SEMARANG*, 13(2).
- Primasari, N. H. (2016, Oktober 2). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan FE Universitas Budi Luhur*, 5(2).
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22-39.
- Ramdhani, P. E. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Subang. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 22-33.
- Salmah, S. (2018, April). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *INVENTORY, Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA*, 1(2).
- Siregar, D. L. (2017, Juli). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 1(2), 119-128.
- Soda, J., Sondakh, J., & Budiarmo, N. (2021, Januari). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9(1), 1115-1126.
- Suryati, L., & Setiawati, E. (2020). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta). *Proceeding NCAA (National conference on accounting and auditing)*, 2.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, VII(1).
- Wulandari, T., & Suyanto. (2014, Desember). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, 2(2).